

RINGKASAN

**MARSHA
ZAHWASHALIYA
ROKAN**

NIM. 220510052

**Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Tindak Pidana Penipuan Jual
Beli Kendaraan Bermotor Berdokumen
Palsu Di Kota Lhokseumawe**

**(Dr. Sulaiman,S.H., M.Hum dan Dr.
Nasrianti,S.H., M.H)**

Pemalsuan dokumen kendaraan bermotor merupakan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 391 dan Pasal 392. Fenomena ini ditemukan di Kota Lhokseumawe, sebagaimana konferensi pers Polres Lhokseumawe pada Mei 2025 mengungkap dua kasus penipuan dan penggelapan kendaraan dengan penggunaan STNK dan BPKB palsu. Hal tersebut menunjukkan adanya kerugian ekonomi, ketidakpastian hukum atas kendaraan, serta kesulitan korban dalam memperoleh kembali haknya sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan penegak hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli kendaraan bermotor berdokumen palsu di Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepolisian, Samsat, dan korban. Data dari Kepolisian diuraikan mengenai proses penanganan perkara, data Samsat mengenai verifikasi dokumen kendaraan, sedangkan data korban mengenai modus penipuan, kerugian, dan pengalaman memperoleh perlindungan hukum. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli kendaraan bermotor berdokumen palsu di Kota Lhokseumawe telah dilaksanakan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan oleh pihak kepolisian, sehingga hak korban untuk mengakses proses hukum pada dasarnya telah terpenuhi. Selain itu, upaya penegakan hukum juga dilakukan secara sistematis melalui kerja sama antarinstansi seperti Samsat dan Dinas Perhubungan serta disertai langkah preventif berupa edukasi kepada masyarakat. Namun demikian, perlindungan yang diberikan masih didominasi aspek prosedural-formal dan berorientasi pada pembuktian perkara serta pengungkapan pelaku, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan substantif, terutama dalam hal pemulihan kerugian korban.

Perlindungan hukum terhadap korban telah dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana dan kerja sama antarinstansi, namun masih berorientasi pada aspek prosedural sehingga pemulihan hak korban belum optimal. Disarankan untuk meningkatkan perlindungan yang lebih substantif melalui pendampingan dan lebih mendepankan pemulihan kerugian korban secara materil.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Dokumen Kendaraan Bermotor Palsu, Penipuan.

SUMARRY

MARSHA
ZAHWASHALIYA
ROKAN

*Legal Protection for Victims of
Fraudulent Motor Vehicle Sales with
Fake Documents in Lhokseumawe City*

NIM. 220510052

(Dr. Sulaiman,S.H.,M.Hum dan Dr.
Nasrianti,S.H.,M.H)

The forgery of motor vehicle documents is a criminal offense regulated under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), specifically Articles 391 and 392. This phenomenon has been observed in Lhokseumawe City; a press conference held by the Lhokseumawe City Police in May 2025 revealed two cases of vehicle fraud and embezzlement involving the use of forged vehicle registration certificates (STNK) and vehicle ownership books (BPKB). These situations entail economic losses, compromise the legal status of the vehicles, and create difficulties for victims in reclaiming their rights, thereby necessitating adequate legal protection.

This study aims to examine the legal protection and law enforcement measures available to victims of fraud involving the sale and purchase of motor vehicles with forged documents in Lhokseumawe City.

The study employs an empirical legal research method with a descriptive nature and a statutory approach. Data were obtained through interviews with the police, the One-Stop Administration Services Office (Samsat), and victims, as well as through literature reviews and document analysis. The data were analyzed descriptively to assess legal protections, obstacles, and the handling of fraud cases involving motor vehicles with forged documents in Lhokseumawe City.

The research findings indicate that legal protection for victims of fraud involving motor vehicles with forged documents in Lhokseumawe City has been implemented through the criminal justice process—comprising report intake, preliminary inquiry, and formal investigation by the police—thereby essentially fulfilling the victims' right to access legal proceedings. Furthermore, law enforcement efforts are conducted systematically through inter-agency cooperation (involving Samsat and the Transportation Agency) and are accompanied by preventive measures such as public education. However, the protection provided remains dominated by formal procedural aspects and is oriented toward proving the case and prosecuting the perpetrator; consequently, it does not yet fully reflect substantive protection, particularly regarding the restitution of victims' losses. Legal protection for victims has been implemented through the criminal justice system and inter-agency cooperation; however, the approach remains procedurally oriented, resulting in suboptimal restoration of victims' rights. It is recommended to enhance protection by providing substantive support and prioritizing the material restitution of victims' losses.

Keywords: Legal Protection, Fake Motor Vehicle Documents, Fraud.